

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA: STUDI KASUS DESA MANDALASARI KABUPATEN GARUT

Yasmin Putri Sabina¹, Rostiena Pasciana², Zulkifli Adnan³

^{1),2),3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut

Email: 24012122068@uniga.ac.id¹, rostiena_pasciana@fisip.uniga.ac.id², zulkifli@fisip.uniga.ac.id³

ABSTRACT

Garut Regency has a very high risk of natural disasters. The local government faces budget and human resource limitations in mitigation efforts, making cross-sectoral synergy an absolute necessity. This study aims to analyze the implementation of the Disaster Resilient Village (DESTANA) program in Mandasari Village Garut Regency, using a collaborative governance approach. The research method used is descriptive qualitative with a case study in one pilot village. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews with frontline actors, and documentation studies. The results indicate that collaborative governance in Mandalasari Village has been integrated through deliberation and mutual cooperation, successfully building community trust. However, initial conditions and institutional design still require strengthening due to rigid bureaucracy and cross-departmental communication barriers. In conclusion, collaborative governance is the main driver of village barriers resilience. Local governments are advised to integrate cross-sectoral policies for sustainable preparedness programs.

Keywords: Collaboration, Community, DESTANA, Disaster, Preparedness

ABSTRAK

Kabupaten Garut memiliki risiko bencana alam yang sangat tinggi. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam upaya mitigasi, sehingga sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus di desa percontohan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aktor garda terdepan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di Desa Mandalasari telah berjalan terpadu melalui proses musyawarah dan gotong royong yang sukses membangun kepercayaan warga. Namun, kondisi awal dan desain kelembagaan masih memerlukan penguatan akibat birokrasi yang kaku dan hambatan komunikasi lintas dinas. Hasil penelitian menunjukkan, tata kelola kolaboratif merupakan pendorong utama ketangguhan desa. Pemerintah daerah disarankan untuk lebih mengintegrasikan kebijakan lintas sektor agar program kesiapsiagaan dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Bencana, DESTANA, Kolaborasi, Masyarakat, Mitigasi Bencana

A. PENDAHULUAN

Secara geologis, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan berada di persimpangan empat lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik. Di bagian selatan dan timur Indonesia, terdapat jalur vulkanik yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga

Sulawesi. Situasi ini membuat Indonesia rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api (Ismana et al., 2022).

Sebagai negara yang berada di *ring of fire*, Indonesia rawan terhadap bencana alam (Nugroho et al., 2023). Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB), sebagai otoritas dalam penanggulangan bencana yang

ada, Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ditujukan bagi desa yang masuk kategori desa rawan bencana (Bhaskara & Purwaningsih, 2023). Tingginya probabilitas bencana alam ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak lagi dapat dipandang secara eksklusif sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Dalam administrasi publik, penyelesaian masalah publik yang kompleks seperti bencana menuntut adanya orkestrasi lintas aktor guna mewujudkan pelayanan yang responsif dan efektif.

Sebagai salah satu wilayah dengan indeks risiko bencana tinggi di Jawa Barat, Kabupaten Garut menghadapi bahaya banjir dan tanah longsor, yang semakin parah akibat medan pegunungan dan perbukitan serta tingginya curah hujan. Menghadapi situasi rentan ini, pendekatan dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) perlu diubah dari respons pasca bencana menjadi tindakan pencegahan dengan memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat dasar. Dasar normatif dari inisiatif ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, 2007) dan secara praktis melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1 Tahun

2012, 2012). Lebih lanjut, di tingkat daerah, pembentukan DESTANA ini disesuaikan dan diimplementasikan secara spesifik berdasarkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (*Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2023*, 2023).

Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Garut telah berupaya melakukan langkah mitigasi preventif berbasis masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

Program ini telah diimplementasikan secara masif dan terus meluas ke berbagai kecamatan yang memiliki potensi ancaman bencana. Ada pun sebaran data 96 desa yang telah berstatus sebagai Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut hingga saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Sebaran Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut
Tahun 2026

No	Kecamatan	Desa	Total Desa
1.	Balubur Limbangan	-	-
2.	Banjarwangi	Bojong, Tanjungjaya	2
3.	Banyuresmi	Sukalaksana, Sukaraja, Sukaratu	3

No	Kecamatan	Desa	Total Desa
4.	Bayongbong	Mulyasari	1
5.	Bungbulang	Margalaksana	1
6.	Caringin	Purbayani	1
7.	Cibalong	Karyasari	1
8.	Cibatu	Kertajaya	1
9.	Cibiuk	-	-
10.	Cigedug	Barusuda, Cigedug, Cintanagara, Sindangsari, Sukahurip	5
11.	Cihurip	-	-
12.	Cikajang	Cibodas, Mekarjaya,	2
13.	Cikelet	Cigadog, Pamalayan	2
14.	Cilawu	Karyamekar, Mangkurayat, Margalaksana, Mekarmukti, Ngamplangsari, Sukamaju, Sukamurni	7
15.	Cisewu	-	-
16.	Cisompet	Depok, Neglasari, Sindangsari,	3
17.	Cisurupan	Balewangi, Kramatwangi, Pangauban	3
18.	Garut Kota	Ciwalen, Margawati, Sukamentri	3
19.	Kadungora	Mandalasari	1
20.	Karangpawitan	Cimurah, Godog, Tanjungsari	3

No	Kecamatan	Desa	Total Desa
21.	Karagtengah	Cinta	1
22.	Kersamanah	-	-
23.	Leles	Cipinar, Jangkurang,	2
24.	Leuwigoong	Karanganyar	1
25.	Malangbong	Cibunar, Karangmulya, Sekarwangi, Sukamanah	4
26.	Mekarmukti	Cijayana, Jayabaya	2
27.	Pakenjeng	Depok, Jatiwangi, Jayamekar, Pasirlangu, Wangunjaya	5
28.	Pameungpeuk	Mancagahar, Pameungpeuk, Sirnabakti	3
29.	Pamulihan	Garumukti, Pakenjeng, Pananjung	3
30.	Pangatikan	Sukahurip	1
31.	Pasirwangi	Barusari, Karyamekar, Padaasih, Padamukti, Padamulya, Padaawas, Pasirwangi, Talaga	8
32.	Peundeuy	Saribakti	1
33.	Samarang	Cintarasa, Tanjung Karya	2
34.	Selaawi	Cigawir, Cirapuhan, Mekarsari,	7

No	Kecamatan	Desa	Total Desa
		Pelitaasih, Putra jawa, Samida, Selaawi	
35.	Singajaya	Sukawangi	1
36.	Sucinaraja	-	-
37.	Sukaesmi	-	-
38.	Sukawening	Sukawening	1
39.	Talegong	Sukamulya	1
40.	Tarogong Kaler	Cimanganten, Mekarjaya, Pasawahan, Rancabango, Sirnajaya	5
41.	Tarogong Kidul	Haurpanggung, Mekargalih, Pataruman, Sukabakti, Sukajaya, Sukakarya, Tarogong	7
42.	Wanaraja	Sindangratu, Wanamekar	2
		Total Seluruh Desa	96

Sumber : BPBD Kabupaten Garut 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan program DESTANA di Kabupaten Garut memiliki skala cakupan yang sangat luas, yakni mencapai 96 desa yang tersebar di puluhan kecamatan. Secara administratif, kuantitas ini merupakan capaian positif dalam memperluas jangkauan pengurangan risiko bencana. Namun, besarnya

jumlah desa sasaran ini ternyata membawa tantangan manajerial yang kompleks di lapangan.

Penyelenggaraan program pembinaan mitigasi di 96 desa dengan medan geografis yang rawan ini tentunya tidak mungkin dieksekusi secara tunggal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, mengingat adanya keterbatasan kapasitas anggaran dan sumber daya manusia. Kondisi cakupan wilayah yang terlalu luas ini menuntut adanya orkestrasi lintas sektor melalui praktik *Collaborative Governance* yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi difokuskan pada aktor garfa terdepan (*first responder*), yang meliputi BPBD sebagai koordinator utama, Dinas Pemadam Kebakaran sebagai pendukung teknis penyelamatan, unsur Akademisi, serta unsur Masyarakat dan Relawan Kebencanaan. Sinergi dari aktor multisektoral inilah yang menjadi kunci krusial untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan ke-96 desa tersebut benar-benar tangguh dan mandiri secara operasional, bukan hanya tangguh di atas kertas.

Keterlibatan aktor multisektoral ini merupakan perwujudan dari praktik *collaborative governance*. Menurut Ansell and Gash (2008), *collaborative governance* adalah pengaturan tata kelola yang mengintegrasikan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan

keputusan kolektif guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks DESTANA, kolaborasi ini krusial untuk mensinergikan sumber daya dan kapasitas masing-masing aktor demi ketangguh masyarakat (Ansell & Gash, 2008)

Pemilihan Desa Mandalasari di Kecamatan Kadungora sebagai lokus utama kajian dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan historis dan karakteristik kerawanan bencana yang sangat kuat. Secara historis, Desa Mandalasari merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah akibat bencana tanah longsor masif pada tahun 2003 yang menelan hingga 22 korban jiwa dan merusak kawasan di perbatasan dua desa. Tingginya risiko kebencanaan ini menjadi dasar bagi BPBD Kabupaten Garut untuk menetapkan desa ini sebagai prioritas dalam penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Selain memiliki tingkat kerawanan geologis yang tinggi, Desa Mandalasari juga diakui oleh pihak kecamatan sebagai salah satu DESTANA yang paling aktif serta sering dijadikan ujung tombak dalam penanganan darurat bencana.

Namun demikian, hasil observasi mendalam dan wawancara dengan para aktor garda terdepan mengidentifikasinya adanya disfungsi serius pada tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang mengancam keberlanjutan program DESTANA Mandalasari. Dari dimensi kondisi awal

(*starting conditions*) hambatan utama di lapangan berakar pada asimetri sumber daya pasca pembentukan forum. BPBD hanya mengalokasikan anggaran pada tahap awal sosialisasi dan pembentukan, sementara operasional kelanjutan dilepaskan tanpa dukungan finansial berkelanjutan. Ketiadaan anggaran ini berimplikasi langsung pada penurunan drastis jumlah relawan aktif yang semula berjumlah 46 hingga 60 orang saat pembentukan awal, kini hanya tersisa 15 orang personel. Penyusutan jumlah relawan hingga lebih dari 70% ini disebabkan oleh benturan kebutuhan ekonomi rumah tangga relawan yang harus bekerja mencari nafkah di luar desa tanpa adanya jaminan insentif kebencanaan yang memadai.

Masalah lainnya muncul dari dimensi desain kelembagaan (*institutional design*), di mana kesepakatan aturan main dan hasil perencanaan teknis pengurangan risiko bencana di tingkat desa belum terealisasi secara fisik. Meskipun keberadaan relawan secara administratif telah dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, namun instrumen keselamatan dasar seperti pemasangan rambu-rambu peringatan dini dan pembuatan jalur evakuasi aman yang telah dipetakan bersama warga belum diwujudkan di lingkungan fisik desa. Akibat keterbatasan dana swadaya dan ketiadaan stimulus anggaran dari pemerintah kabupaten, dokumen peta risiko bencana tersebut hingga kini hanya berakhir sebagai

rencana di atas kertas.

Kondisi tersebut diperparah oleh disfungsi pada dimensi proses kolaborasi (*collaborative process*), khususnya pada aspek komitmen berkelanjutan antar-aktor (Rostiena Pasciana et al., 2026). Hubungan kerja sama lintas sektor dalam DESTANA cenderung berjalan secara temporer dan insidental. Pihak akademisi menyoroti adanya kecenderungan pendekatan “dibentuk lalu ditinggalkan” oleh instansi pembina, di mana tidak ada mekanisme pemantauan (*monitoring*) yang matang, indikator capaian (*KPI*), maupun penyegaran pelatihan kebencanaan (*refreshment*) secara berkala bagi relawan. Akibatnya, aktivitas komunikasi tatap muka berupa rembuk warga tidak berjalan secara rutin, melainkan hanya digelar secara situasional menjelang datangnya musim penghujan atau saat ada kunjungan formal dari BPBD kabupaten.

Urgensi kajian mengenai kelembagaan dan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Pada tataran evaluasi kolaborasi, (Kurniaty et al., 2024). Menemukan bahwa implementasi program DESTANA di Kabupaten Karo menghadapi tantangan besar, di mana hanya 1 dari 14 desa yang mampu menjalankan proses kolaborasi dengan baik berbasis kearifan lokal “Runggu”. Tantangan kolaborasi ini juga dikonfirmasi oleh (Bhaskara & Purwaningsih, 2023) melalui pendekatan Pentahelix di Kabupaten

Magelang, yang mengidentifikasi bahwa sinergi kolaborasi belum optimal karena minimnya pelibatan sektor bisnis dan media di luar kondisi darurat. Padahal, saat tata kelola kolaboratif berhasil diwujudkan seperti pada studi (Nilawati, 2022) tentang penanganan pandemi di Gunung Kidul prinsip kebersamaan dan kapasitas aksi bersama antar aktor mampu mendorong keberhasilan yang signifikan.

Dari segi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, riset (Mulajaya & Christiani, 2024) menekankan bahwa pengembangan kelembagaan DESTANA berhasil mencetak wadah seperti Forum PRB, meskipun kerja sama lintas wilayah masih terkendala oleh ketiadaan perjanjian formal (MoU). Di tingkat teknis, efektivitas DESTANA dalam meningkatkan literasi dan kapasitas mitigasi masyarakat dibuktikan oleh (Fandayati & Kurniawan, 2022) di Kota Kediri, yang menunjukkan lonjakan skor pemahaman warga secara nyata pasca-intervensi program. Hal ini sejalan dengan temuan (Nugroho et al., 2023) yang menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif (*Participatory Action Research*) yang mengikutsertakan kelompok paling berisiko secara langsung dalam desain manajemen PRB.

Di sisi lain, beberapa kajian terdahulu mencoba melihat program Desatana dari skala makro dan komparatif. Evaluasi menggunakan Indeks Ketahanan Desa oleh (Lessy et al., 2026) di Ternate mengungkap fakta bahwa

secara agregat, 62% desa tangguh bencana masih tertahan pada level Pratama (pemula). Selain itu, riset kuantitatif (Azhari et al., 2025) di Cilacap mencatat bahwa efektivitas DESTANA sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya di mana peran DESTANA belum terbukti signifikan menjadi moderasi ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Kegagalan koordinasi dan kesinambungan ini juga diangkat oleh (Wahyudi et al., 2026) dalam studi komparasinya, yang menggaris bawahi program DESTANA seperti di Aceh seringkali lemah secara koordinasi formal dan berkelanjutan dibandingkan dengan model mitigasi di negara maju seperti Jepang.

Kondisi dan berbagai temuan literatur tersebut mempresentasikan adanya *gap* (kesenjangan) antara idealitas desain kebijakan dan realitas kolaborasi di lapangan, di mana evaluasi di berbagai daerah menunjukkan disfungsi manajerial yang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penyelenggaraan program DESTANA di Kabupaten Garut menggunakan lensa analisis *Collaborative Governance* Ansell and Gash (2008), yang mencakup dimensi *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Kajian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi teoretis pada literatur administrasi publik dan implikasi bagi perbaikan tata kelola

penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara dan manajemen pemerintahan. Administrasi publik, sebagai ilmu sekaligus praktik penyelenggaraan pemerintahan, didefinisikan sebagai serangkaian proses pengorganisasian, pengelolaan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan publik oleh aparatur negara guna mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama masyarakat. Dalam perspektif keilmuan, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan birokrasi dan prosedur secara kaku, melainkan merupakan penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan publik dan regulasi dalam tindakan nyata (*in action*). Sebagai suatu bidang ilmu dan praktik, administrasi publik mencakup dimensi koordinasi lintas organisasi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah dalam melayani kebutuhan warganya (Triprasetyo et al., 2024). Pengelolaan bencana pada hakikatnya adalah bagian integral dari fungsi administrasi publik, karena melibatkan perencanaan kebijakan, alokasi sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada perlindungan masyarakat.

Kebijakan Publik

Dalam praktiknya, upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan masyarakat diwujudkan melalui kebijakan publik. Salah satu kebijakan publik yang paling fundamental terkait perlindungan masyarakat adalah kebijakan penanggulangan bencana, yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan undang-undang tersebut, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Kebijakan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang terstruktur. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi tiga tahapan utama, tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (rehabilitas dan rekonstruksi).

Collaborative Governance

Untuk mengatasi kompleksitas dalam penanggulangan bencana yang melibatkan multi-aktor, diperlukan pendekatan tata kelola kolaboratif atau *Collaborative Governance*. Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* adalah sebuah pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola program publik (Ansell & Gash, 2008).

Dalam kerangka kerjanya, Ansell dan Gash menekankan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dipengaruhi oleh empat variabel luas, yaitu:

a. Kondisi awal (*starting conditions*)

Melibatkan sejarah konflik atau kerja sama, insentif untuk berpartisipasi, dan asimetri kekuasaan atau sumber daya.

b. Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*)

Kepemimpinan yang memediasi, memberdayakan, dan menjaga integritas proses kolaborasi.

c. Desain Kelembagaan (*institutional design*)

Protokol dasar dan aturan main yang menjamin transparansi serta inklusivitas.

d. Proses kolaboratif (*collaborative process*)

Proses siklikal yang meliputi dialog tatap muka (*face to face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), pembentukan komitmen, pemahaman bersama (*shared understanding*), dan perolehan hasil sementara (*intermediate outcomes/small wins*). Teori ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana sistem informasi kebencanaan dapat bertindak sebagai alat pencipta “pemahaman bersama” dalam ekosistem mitigasi bencana.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebencanaan

Kesehatan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi lingkungan dan kerentanan mereka terhadap ancaman bencana. Bencana dapat memperburuk kondisi lingkungan dan sosial ekonomi, serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya dan fasilitas kesehatan, yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi mereka untuk memperoleh kontrol dan hak atas sumber daya yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup saat krisis terjadi.

Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen bencana berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemampuan warga untuk membuat keputusan serta mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mereka secara mandiri melalui pemberdayaan,

masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka baik selama maupun setelah bencana. Strategi manajemen bencana yang mengkolaborasikan pemberdayaan ini memastikan bahwa masyarakat menjadi tanggap, siap, dan memiliki kapasitas mumpuni untuk bertahan, meminimalkan risiko, dan memulihkan diri dengan cepat pascabencana (Angelina Qur'ainny et al., 2025).

Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Secara definisi, Desa Tangguh Bencana (DESTANA) adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Masyarakat di desa tangguh bencana diharapkan mampu mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal secara partisipatif untuk meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana. Landasan hukum pembentukan DESTANA di tingkat nasional diatur melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Secara operasional di tingkat daerah Kabupaten Garut, program ini merujuk pada Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Berdasarkan pedoman fasilitasi dari BNPB, pembentukan dan penyelenggaraan operasional DESTANA harus melewati 11 tahapan atau indikator utama yaitu:

- a. Kajian dan Peta Ancaman;
- b. Kajian dan Peta Kerentanan masyarakat;
- c. Kajian dan Peta Kapasitas masyarakat;
- d. Kajian dan Peta Risiko;
- e. Pembuatan Peta Evakuasi;
- f. Penyusunan draf Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) desa;
- g. Rencana Aksi Komunitas (RAK);
- h. Rencana Kontinjensi;
- i. Pembentukan organisasi atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa;
- j. Pembentukan Relawan Desa; dan
- k. Pembangunan sistem peringatan dini bahaya berbasis masyarakat.

Dalam perkembangannya, parameter pengukuran evaluasi ketangguhan sebuah desa juga distandarisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang kemudian diadopsi menjadi Indeks Ketahanan Desa. Untuk mengukur indeks ini, digunakan 5 pilar ketahanan desa, yang meliputi:

- a. Kualitas dan akses layanan dasar, yang mencakup pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas umum, dan sistem informasi.

b. Sistem manajemen bencana, yang meliputi dukungan kebijakan, regulasi kebencanaan, kajian risiko, rencana manajemen bencana, serta kehadiran Forum PRB.

c. Aksi pengurangan risiko, yang berupa aksi terintegrasi dalam manajemen risiko dan pengembangan kapasitas warga melalui pelatihan.

d. Kesiapsiagaan darurat, yang meliputi sistem deteksi dini, akses peringatan, peta evakuasi, rambu dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi bencana dan keberadaan relawan desa.

e. Kesiapsiagaan pemulihan, yang berfokus pada rencana pemulihan desa dan sistem penghitungan kerusakan serta kerugian pascabencana.

Pendekatan *Pentahelix* dalam Implementasi DESTANA

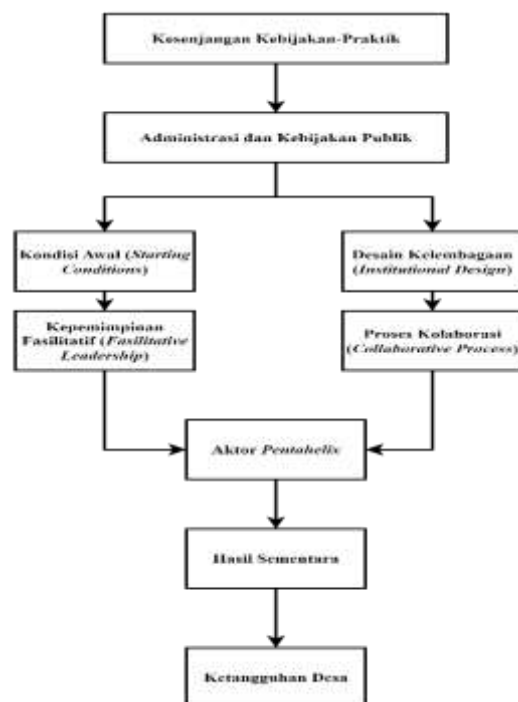
Penyelenggaraan DESTANA tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara tunggal. Keberhasilan tata kelola manajemen bencana menuntut partisipasi aktor secara kolaboratif guna mewujudkan ketangguhan masyarakat (Firdaus et al., n.d.). Pendekatan kolaborasi yang ideal dan mampu menjawab masalah ini adalah konsep *pentahelix*, yang memetakan dan mensinergikan aktor ke dalam 5 elemen strategis, yaitu:

- a. Pemerintah (*Goverment*), meliputi kementerian, lembaga negara, birokrat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, dan

- pemerintah desa. Aktor ini bertugas sebagai pemegang otoritas, penyedia kebijakan, serta koordinator utama yang menjembatani jalannya program manajemen bencana di daerah.
- b. Masyarakat (*Community*), meliputi tokoh masyarakat, kelompok pemuda, organisasi masyarakat (ormas), relawan, dan Forum PRB tingkat desa. Masyarakat merupakan aktor kunci yang paling terdampak sekaligus menjadi pelaksana dan pengelola utama kegiatan Desatana agar bisa mandiri dalam beradaptasi dan merespons krisis.
- c. Akademisi (*Academic*), meliputi perguruan tinggi, dosen, peneliti, analis, dan mahasiswa. Akademisi berperan dalam melakukan penelitian dan pemetaan potensi bahaya secara ilmiah, melakukan transfer pengetahuan (edukasi), serta membantu program peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan pengabdian masyarakat di desa rawan bencana.
- d. Dunia Usaha (*Business*), meliputi perusahaan swasta, pengusaha, atau pelaku bisnis. Sektor ini berperan memberikan pendanaan alternatif melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), bantuan logistik saat kondisi darurat, serta dapat menjalin kemitraan dengan desa untuk membina ketangguhan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

- e. Media (*Media*), meliputi jurnalis, kantor berita, platform media sosial, dan reporter. Media memegang fungsi krusial dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini, mempublikasi kegiatan mitigasi desa untuk mengedukasi khalayak luas, serta membangun jaringan komunikasi yang cepat selama fase pra-bencana, darurat, maupun pascabencana.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam permasalahan penyelenggaraan program desa tangguh bencana (DESTANA) di Kabupaten Garut. Desain ini dipilih karena

relevan untuk membedah fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, khususnya dalam mengevaluasi kerangka kerja tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Fokus kajian ini diarahkan untuk mengamati interaksi antaraktor melalui empat dimensi kolaborasi menurut kerangka Ansell dan Gash (2008), yakni kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, penentuan lokasi dan terget informan tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi yang ada, melainkan untuk menggali kedalaman informasi terkait proses dan makna dari sebuah fenomena. Oleh karena itu, meskipun secara administratif penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Garut mencakup populasi yang luas yakni mencapai 96 desa, penelitian ini tidak menjadikan seluruh desa tersebut sebagai target observasi dan wawancara. Penelitian secara sengaja memfokuskan studi kasus pada 1 (satu) desa percontohan melalui teknik *purposive sampling*. Pemilihan satu desa ini didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu desa tersebut dinilai paling representatif dan aktif dalam merealisasikan pelibatan aktor lintas

sektor pada penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Pemilihan sampel tunggal dari populasi DESTANA yang besar ini merupakan praktik yang sangat lazim secara metodologi dalam studi *Collaborative Governance*. Sebagai rujukan empiris, penelitian yang dilakukan oleh Bhaskara & Purwaningsih (2023) tentang kolaborasi *Pentahelix* DESTANA di Kabupaten Magelang juga hanya menjadikan 1 desa (Desa Sumber) sebagai sampel fokus penelitian dari total 85 desa yang berstatus DESTANA di kabupaten tersebut. Praktik serupa juga ditemukan pada penelitian Kurtiany et al.(2024), di mana dari total 14 desa tangguh bencana yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Karo, peneliti hanya memfokuskan kajian pada 1 desa yang terbukti berhasil (Desa Gung Pito) untuk dianalisis proses kolaborasinya secara mendalam.

Melalui pembatasan pada satu desa lokus tersebut, data primer ditarik dari informan kunci yang dinilai memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung. Penarikan informan difokuskan pada aktor garda terdepan (*first responden*), yang mencakup unsur Pemerintah Kabupaten (BPBD Kabupaten Garut dan Dinas Pemadam Kebakaran), unsur Akademis, serta unsur Masyarakat, FPRB Desa Mandalasari, kelompok relawan kebencanaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang, pedoman teknis BNPPB, Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2023, serta arsip dan laporan

kegiatan pelaksanaan DESTANA di lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengolahan NVivo

Bagian hasil ini disusun berdasarkan interpretasi data yang diperoleh dari tiga visualisasi utama yang dihasilkan melalui pengolahan transkrip wawancara mendalam dengan para aktor lintas sektor (BPBD Kabupaten Garut, Dinas Pemadam Kebakaran, Akademisi, Ketua FPRB Desa Mandalasari, Relawan Desa Mandalasari, Masyarakat Desa Mandalasari) yaitu *Word Cloud*, *Hierarchy Chart*, dan *Project Map*.

a. *Word Cloud*



Gambar 2. Word Cloud

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Visualisasi pada Gambar 2 menunjukkan istilah-istilah yang paling sering muncul dalam wawancara dengan para informan kunci terkait penyelenggaraan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Istilah-istilah dengan frekuensi tertinggi yaitu desa, masyarakat, bencana,

warga, relawan, DESTANA, pemerintah, dan BPBD. Kemunculan kata-kata tersebut menandakan bahwa prioritas strategis dan isu sentral di lapangan sangat bertumpu pada pelibatan aktor lintas sektor. Hal ini secara langsung mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan program DESTANA di Kabupaten Garut bukanlah tugas tunggal satu instansi, melainkan sebuah proses tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menuntut sinergi kuat antar unsur pemerintah seperti (BPBD)) dengan elemen akar rumput seperti (relawan, warga, dan masyarakat desa) dalam mewujudkan ketangguhan bencana.

b. *Hierarchy Chart*



Gambar 3. *Hierarchy Chart*

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Gambar 3 memperlihatkan bahwa program DESTANA menjalankan lima dimensi tata kelola kolaboratif secara terpadu, mulai dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, hingga hasil sementara. Setiap dimensi saling melengkapi melalui aktivitas seperti penguatan regulasi, penyedia layanan, komunikasi dua arah, serta penciptaan ketangguhan kolektif. Untuk memperjelas keterkaitan antara dimensi-

dimensi tersebut dengan praktik di lapangan, disajikan tabel yang merangkum bagaimana setiap dimensi dioperasionalkan oleh aktor-aktor DESTANA di Kabupaten Garut.

Tabel 1

Keterkaitan Dimensi Tata Kelola Kolaboratif dengan Program DESTANA

No	Dimensi Peran	Indikator Utama	Realitas Program DESTANA
1.	Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>)	Keterbatasan Sumber Daya & Ego Sektoral; Insentif & Motivasi; Pengalaman & Memori Bencana	Terbatasnya anggaran desa dan personel instansi serta adanya ego sektoral, yang berhasil diimbangi dengan motivasi pengabdian para aktor serta memori masyarakat terhadap bencana longsor tahun 2003 sebagai pendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
2.	Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>)	Protokol Dasar & Aturan Main; Transparansi & Inklusivitas	Pelaksanaan DESTANA didukung oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2023, penyusunan dokumen RSIPK oleh damkar, serta pelibatan kelompok rentan (lansia,

No	Dimensi Peran	Indikator Utama	Realitas Program DESTANA
			penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak) dalam penyusunan peta risiko maupun simulasi evakuasi.
3.	Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	Peran Koordinasi BPBD; Kepemimpinan Desa & Tokoh Masyarakat	BPBD berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan instansi teknis, seperti Damkar, sebagai narasumber kegiatan kebencanaan. Di tingkat desa, Kepala Desa Mandalasari bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Program DESTANA
4.	Proses Kolaborasi (<i>Collaborative Process</i>)	Dialog Tatap Muka; Membangun Kepercayaan; Pemahaman Bersama	Kolaborasi diwujudkan melalui forum diskusi (FGD), koordinasi lintas sektor, kegiatan gotong royong seperti pembersihan saluran air, serta terbentuknya

No	Dimensi Peran	Indikator Utama	Realitas Program DESTANA
			pemahaman bersama bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.
5.	Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>)	Capaian Kesiapsiagaan; Bukti Fisik; Kekurangan Hasil	Program DESTANA meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui tersedianya peta evakuasi, terbentuknya relawan FPRB yang lebih mandiri, dan meningkatnya koordinasi saat penanganan bencana. Namun demikian, hasil kajian akademisi belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi kebijakan maupun program yang berkelanjutan.

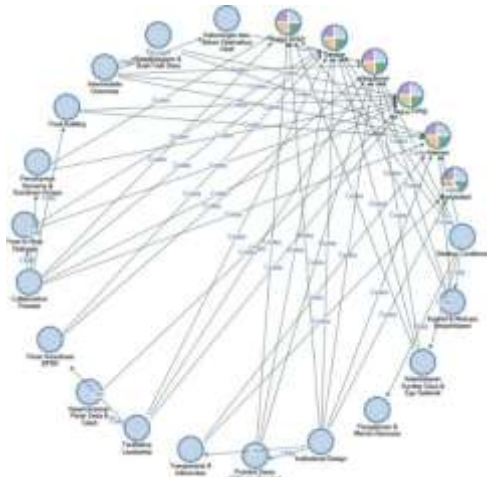
Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penyelenggaraan DESTANA dijalankan melalui lima dimensi tata kelola kolaboratif melalui program yang langsung menyentuh ketahanan warga. Keterbatasan sumber daya dan ego sektoral di awal dapat ditekan melalui kepemimpinan desa yang kuat dan regulasi

Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

yang transparan. DESTANA juga mendukung program pembangunan lewat edukasi lintas instansi, memperkuat partisipasi melalui dialog tatap muka dan *trust building*, serta memantau hasil sementara berupa kemandirian respons masyarakat, meskipun masih terdapat kekurangan pada tindak lanjut dokumen akademisi.

c. *Project Map*



Gambar 1 Project Map

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Gambar 3 di atas menggambarkan hubungan antara dimensi tata kelola kolaboratif, kode hasil analisis, sektor aktor pemangku kepentingan yang digunakan untuk mengidentifikasi pola kerja DESTANA. Node lingkaran biru menunjukkan tema-tema utama yang merupakan indikator, seperti keterbatasan sumber daya, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, transparansi & inklusivitas, hingga hasil kesiapsiagaan. Sementara itu, garis penghubung *node “Codes”* berfungsi sebagai jembatan antara aktor dan tema melalui

pengodean *Nvivo*, sedangkan gambar *node* di bagian atas dan kanan (Kabid BPBD, Damkar, Akademisi, Ketua FPRB, Relawan, Masyarakat) memperlihatkan kelompok aktor yang menjadi landasan analisis. Kedapatan hubungan antar *node* memperlihatkan bahwa satu aktor dapat mendukung berbagai tema sekaligus, sehingga mencerminkan sifat kerja kolaborasi yang tidak terpisah-pisah.

Secara keseluruhan, *Project Map* ini menggambarkan bagaimana aktor garda terdepan DESTANA menjalankan perannya secara *multidimensional* dan saling berkaitan. Keterhubungan yang luas menunjukkan bahwa aktivitas para aktor berkontribusi pada sejumlah pencapaian strategis, terutama dalam pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan relasi sosial, serta instansi birokrasi di tingkat kabupaten. Melalui gambar ini, terlihat bahwa setiap instansi dan warga tidak berdiri sendiri, melainkan saling tarik-menarik dan menguatkan dalam mendukung tujuan bersama untuk menciptakan desa yang tangguh terhadap bencana.

2. Dimensi *Collaborative Governance* berdasarkan Ansell dan Gash (2008)

a. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Penyelenggaraan program DESTANA diwarnai oleh asimetri sumber daya lintas sektoral, di mana BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran menghadapi keterbatasan rasio personel dan terhambat oleh minimnya

anggaran operasional di tingkat desa. Keterbatasan ini semakin diperberat oleh kecenderungan ego sektoral di birokrasi, di mana program-program mitigasi rentan berjalan sendiri-sendiri dan bersaing secara pendanaan dengan program serupa milik dinas lain, seperti Kampung Siaga Bencana dari Dinas Sosial.

Namun demikian, kelemahan ini berhasil dijumpai oleh tingginya motivasi masyarakat, yang didorong kuat oleh memori kolektif serta trauma bencana alam masa lalu (tahun 2003), ditambah panggilan pengabdian moral dari unsur akademis dan relawan. Mekanisme inisiasi kolaborasi ini sejalan dengan temuan (Bhaskara & Purwaningsih, 2023) yang menegaskan bahwa program DESTANA memerlukan pemetaan historis wilayah untuk memantik kesadaran kolektif dari masyarakat desa yang rawan terhadap ancaman geologis dan klimatologis secara berulang.

b. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Kejelasan aturan main dan protokol dasar menjadi pondasi penting bagi pencegahan *overlap* kewenangan lintas sektor. Di tingkat regulasi formal, BPBD merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023, sementara Dinas Pemadam Kebakaran menyusun Rencana Induk Sistem Pengendalian Kebakaran (RSIPK) agar tugas pendampingan lebih terarah.

Dari sisi inklusivitas sosial, pelibatan kelompok rentan sangat diutamakan dalam desain program, di mana masyarakat aktif diakomodasi untuk merumuskan pemetaan rawan longsor serta mendata prioritas evakuasi untuk lansia dan disabilitas. Dengan demikian, temuan lapangan menunjukkan masih kakunya kultur birokrasi, di mana beberapa dinas enggan mengambil inisiatif tanpa adanya instruksi hierarkis yang mengikat. Hal ini mendukung temuan (Fandayati & Kurniawan, 2022) di Kota Kediri, yang menyoroti bahwa desa kelembagaan masyarakat dan aparatur birokrasi harus tetap dikembangkan secara partisipatif dan mengedepankan kearifan lokal agar masyarakat menjadi lebih fleksibel dalam mengambil tindakan kesiapsiagaan dini.

c. *Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)*

Kepemimpinan yang memberdayakan dijalankan secara berjenjang. Di tingkat kabupaten, BPBD memberikan ruang bagi instansi teknis lain (seperti Damkar) untuk turut berkontribusi sebagai narasumber dalam program edukasi di desa, sehingga memperluas cakupan keahlian. Di tingkat desa, peran Kepala Desa Mandalasari sangat sentral dalam memfasilitasi merangkul tokoh pemuda, tokoh agama, serta relawan sejak awal pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Kepemimpinan akar rumput ini terbukti menjaga motivasi relawan untuk terus bekerja melayani masyarakat meskipun dukungan

finansial telah terhenti. Gaya kepemimpinan ini selaras dengan prinsip dalam penelitian (Mulajaya & Christiani, 2024), di mana keberhasilan penguatan kapasitas desa-desa tangguh sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan lokal untuk mengkonsolidasikan elemen masyarakat serta membina kerja sama lintas kelembagaan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

d. *Proses Kolaborasi (Collaborative Process)*

Siklus interaksi lintas aktor tidak terbatas pada rapat formal, melainkan juga berjalan efektif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar lembaga dan aktivitas gotong royong rutin. Inisiatif relawan untuk terjun langsung, seperti pembersihan gorong-gorong serta pelaksanaan patroli malam, secara bertahap berhasil menumbuhkan rasa saling percaya (*trust building*) yang kokoh antar kelompok FPRB dengan warga.

Lewat dialog tatap muka ini, terbentuk pemahaman bersama (*shared understanding*) bahwa orientasi utama ketangguhan adalah meminimalkan risiko korban jiwa, bukan hanya mencegah kerusakan alam semata. Proses interaksi ini sesuai dengan temuan (Kurniaty et al., 2024) di Kabupaten Karo, yang membuktikan bahwa komunikasi secara kekeluargaan (“Runggu”) serta pembagian peran melalui simulasi kebencanaan merupakan cara terbaik untuk menanamkan

pemahaman bersama dan menjaga proses kolaborasi di tingkat komunitas tetap hidup.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Tindakan kolaboratif dalam program DESTANA membuahkan hasil sementara berupa capaian kesiapsiagaan fisik dan psikologis di desa. Kemenangan kecil (*small wins*) tercermin dari tidak adanya lagi kepanikan warga, pemahaman terhadap arah jalur evakuasi, serta kemandirian relawan desa dalam pengambilan kendali pertama saat terjadi kebakaran hutan atau banjir. Selain itu, koordinasi masyarakat saat gotong royong menjadi jauh lebih terarah dan bersinergi. Akan tetapi, evaluasi yang dilakukan mengungkap masih ada pekerjaan rumah; misalnya dokumen-dokumen riset akademisi mengenai ketangguhan desa yang masih sekadar berakhir menjadi publikasi tertulis (kertas) dan belum diakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah menjadi kebijakan publik resmi. Fakta ini menegaskan argumen (Lessy et al., 2026), yang menjelaskan bahwa meskipun sebuah desa telah mampu melakukan tindakan mitigasi dasar (berada di fase *Pratama/Beginner*), capaian tersebut masih memerlukan intervensi kebijakan strategis lanjutan agar desa tersebut dapat sepenuhnya mandiri dan mencapai tingkat ketangguhan paripurna (Fase Utama) (Kurniawan & Fandayati, 2023).

E. KESIMPULAN

Tata Kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) memainkan peran penting dalam penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Garut melalui sinergi aktor garda terdepan (*first responder*) yang menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Kolaborasi yang terjalin antara BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Akademisi, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Masyarakat Desa Mandalasari, serta kelompok relawan telah memperluas jangkauan edukasi kebencanaan, inklusivitas pemetaan risiko bagi kelompok rentan, serta ketersediaan regulasi operasional. Dampak dari proses kolaborasi ini terlihat dari meningkatnya kesiapsiagaan warga, hilangnya kepanikan saat terjadi bencana, dan terbentuknya kemandirian relawan desa dalam mengambil kendali pertama saat terjadi musibah seperti kebakaran dan banjir lokal, sehingga masyarakat yang sebelumnya rentan kini dapat lebih tangguh dalam proses adaptasi dan mitigasi.

Penyelenggaraan DESTANA menunjukkan kinerja yang kuat pada dimensi kepemimpinan fasilitatif di tingkat akar rumput, rutinitas proses kolaborasi melalui dialog tatap muka dan *trust building*, serta capaian hasil sementara (*intermediate outcomes*). Sementara itu, aspek kondisi awal dan desain kelembagaan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal mengatasi

keterbatasan anggaran, menekan ego sektoral lintas program, serta mencairkan kultur birokrasi yang kaku dan takut akan tumpang tindih (*overlap*) kewenangan. Secara keseluruhan, tata kelola kolaboratif di Kabupaten Garut telah berperan sebagai pendorong utama ketangguhan desa, meski tetap membutuhkan penguatan integrasi kelembagaan agar sinergi masyarakat dan luaran riset akademisi dapat diadopsi sepenuhnya menjadi kebijakan publik yang resmi dan mengikat.

Penelitian selanjutnya dapat menilai efektivitas tata kelola kolaboratif pada program DESTANA di desa atau di kabupaten lain untuk memungkinkan perbandingan keberhasilan antarwilayah. Kajian juga perlu melibatkan perspektif dari unsur sektor swasta (dunia usaha) guna menilai optimalisasi pendanaan alternatif (CSR) secara lebih komprehensif. Selain itu, analisis mengenai peleburan ego sektoral lintas dinas, fleksibilitas birokrasi, serta pengesahan dokumen riset kampus menjadi kebijakan nyata penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut agar orkestrasi pengurangan risiko bencana tidak terjebak pada capaian administratif, melainkan dapat mempertahankan keberlanjutan program ketangguhan desa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Qur'ainny, Gloria Stevanie Nauli Sianipaar, Muhammad Azka Rozan, & Dian Fitriani Afifah. (2025). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cileles Berdasarkan Perspektif Teori Pemberdayaan Oleh Robert Chambers*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azhari, N. M., Purwana, R., & Mizuno, K. (2025). Assessing the Moderating Role of Destana Program in Community Resilience and Climate Change. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 6(2), 155–163. <https://doi.org/10.47540/ijsei.v6i2.1813>
- Bhaskara, J. A., & Purwaningsih, T. (2023). Pentahelix Approach in The Implementation of Disaster Resilient Village (Destana) Sumber Village Magelang Regency. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 233–252. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10949>
- Fandayati, I., & Kurniawan, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Indonesian Journal of Environment and Disaster (IJED)*, 1(2), 55–64.
- Firdaus, N. M., Sarah, A., & Cahyani, N. (n.d.). *Jurnal Comm-Edu Model Pentahelix Dalam Pemberdayaan Desa Digital Di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung*. 6(2), 2023.
- Ismana, D. R., Baehera, S., & Fitrianto, A. (2022). *Penggerombolan Desa di Jawa Barat Berdasarkan Daerah Rawan Bencana*. 6(2), 243–252.

- Kurniaty, E. Y., Effendy, K., Kawuryan, M. W., & Kurniawati, L. (2024). Collaborative Governance dalam Kesiapsiagaan Bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 13(2), 540–551. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11381>
- Kurniawan, F. A., & Fandayati, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Di Kelurahan Tamanan Dan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 2(2), 99–112. <https://doi.org/10.20961/ijed.v2i2.768>
- Lessy, M. R., Lassa, J., & Zander, K. K. (2026). Towards Resilient Communities: Adopting Destana Standard to Measure Community Resilience for Small Islands in Indonesia. *Environmental Management*, 76(1). <https://doi.org/10.1007/s00267-025-02306-y>
- Mulajaya, R. P., & Christiani, C. (2024). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 693–701. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2466>
- Nilawati, E. (2022). *Tata Kelola Kolaboratif Manajemen Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul Collaborative Governance Covid-19 Pandemic Disaster Emergency Response Management In Gunungkidul Regency* (Vol. 19).
- Nugroho, E., Indarjo, S., Nisa, A. A., Isniyati, H., Hermawan, D. Y., Widyaningrum, H., Wasono, E., Laily, L. A., Utami, A. N. M., Suci, C. W., & Yuswantoro, R. N. (2023). Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, (3), 92–113. <https://doi.org/10.15294/km.v1i3.98>
- Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2023. (2023).
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012. (2012). www.peraturan.go.id
- Rostiena Pasciana, Ieke Sartika Iriany, Mochammad Iqbal Fadhlurrohmah, Dadi Nurdiana, & Meli Amelia. (2026). *Kolaborasi Bhayangkari, PKK, Dan Universitas Garut Dalam Diversifikasi Pangan Melalui Inovasi Mie Bayam Pada Program Pekarangan Pangan Lestari(P2L)*.
- Triprasetyo, R. A., Armita, D., Ulum, M. C., Irawan, A. D., & Royani, E. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik(Terjemahan Konsep Para Ahli)* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. (2007).
- Wahyudi, F., De Ketty, N., Putra Gawa, M., & Kamaly, N. (2026). *Sinergi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Model Jepang dan Destana* Aceh. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v7i1>